

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti sajikan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pengerjaan yang relevan seperti yang diuraikan sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahid, 2012) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan hasil bahwa pertama belanja pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kedua belanja pemerintah bidang Kesehatan berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan belanja tersebut berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM. Ketiga belanja pemerintah lainnya dalam hal ini semua sektor kecuali Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Penelitian (Akbar, 2016) dengan judul penelitian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh positif yang signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial sama sekali tidak berpengaruh pada provinsi indeks pembangunan manusia pada waktu yang tertentu.

Penelitian (Laisina et al., 2015) dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap PDRB di Indonesia menunjukkan hasil bahwasanya berdasarkan pengaruh yang diberikan pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan bersifat positif kepada pertumbuhan ekonomi, sedangkan di sektor Kesehatan bersifat negative terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Allam Hamdan, Adel Sarea, Reem Khamis, Mohammad Anasweh (Hamdan et al., 2020) tentang A causality analysis of the link between higher education and economic development: empirical evidence dengan menggunakan variabel Data on the level of expenditure on higher education, economic growth, and other variables necessary for the study model. Dengan hasil Sebaliknya, tren kausalitasnya adalah dalam hal pertumbuhan ekonomi menuju investasi pendidikan tinggi; Dengan kata lain, pengeluaran untuk pendidikan tinggi di Arab Saudi didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, dan investasi untuk pendidikan tinggi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan seperti di negara maju. Akhirnya, hasil studi tidak mendukung hubungan antara investasi di pendidikan tinggi dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Jorge F. Baca Campodónico Jorge R. Peschiera Cassinelli Jorge A. Mesones (Campodónico et al., 2014) dengan judul The Impact of Public Expenditures in Education, Health, and Infrastructure on Economic Growth and Income Distribution in Peru menggunakan variabel Education, Health, Infrastructure. GDP dengan menunjukkan hasil Kesimpulan menyeluruh dari hasil simulasi adalah bahwa, dalam jangka panjang, memprioritaskan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan daripada investasi di bidang infrastruktur menghasilkan lebih banyak pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Kesimpulan ini berlaku untuk baik sektor publik maupun swasta. Namun, campuran optimal dari berapa banyak lagi yang harus diinvestasikan pendidikan dan kesehatan dan seberapa jauh infrastruktur tergantung pada kondisi awal modal pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mencoba mengukur variabel yang berkaitan dengan pengaruh belanja pemerintah terhadap dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun pada penelitian ini ditambahkan variabel pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur dan lokasi yang terfokus pada wilayah Indonesia bagian timur. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih detail

dan akurat tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu prekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu prekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan sendiri.

Negara kaya maupun miskin yang menganut sistem kapitalis sosial maupun campuran, semuanya sangat mendambakan pertumbuhan ekonomi. Berhasil tidaknya program program pembangunan di negara-negara berkembang sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Menurut (Sukirno, 2013), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah.

Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah : kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi antara lain ada :

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor. Ahli-ahli ekonomi

klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. ia berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung pada pemulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka pengusaha akan mendapat keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti ini tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat kemakmuran yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (stationary state). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat kekurangan produk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Pertumbuhan yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini dimana tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P pertahun, adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode dan adanya kecenderungan menabung (propensity to saving) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q) juga tabungan masyarakat $S = sQ$; bila Q naik S juga naik, sebaliknya serta semua tabungan masyarakat di investasikan $S = I = \Delta K$. Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di investasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital. Yang kemudian pembangunan ekonomi dititik beratkan pada teori pertumbuhan ekonomi klasik dimana penduduk merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan dimana penduduk yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sumber produktivitas dari suatu negara dan merupakan tempat investasi yang baik dalam membangun pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Pertumbuhan Multiplier Effect

Menurut (Indonesia, 2021) Multiplier effect adalah proses yang menunjukkan sejauh mana pendapatan nasional akan berubah efek dari perubahan dalam pengeluaran agregat. Multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Keunikan industri pariwisata terhadap perekonomian berupa dampak ganda (multiplier effect) dari pengeluaran pemerintah terhadap ekonomi. Nilai multiplier ekonomi merupakan nilai yang menunjukkan sejauh mana pengeluaran wisatawan akan menstimulasi pengeluaran lebih lanjut, sehingga pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Menurut terminologi, terdapat tiga efek multiplier, yaitu efek langsung (direct effect), efek tidak langsung (indirect effect) dan efek lanjutan (induced effect). Ketiga efek ini digunakan untuk

menghitung nilai ekonomi yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi dampak ekonomi di tingkat lokal. Konsep multiplier dapat dilihat dari jenis dampak secara langsung, tidak langsung dan dampak lanjutan yang mempengaruhi akibat dari tambahan pengeluaran. Lokal pendapatan Keynesian Multiplier dimana nilai yang dihasilkan dari pengeluaran lebih atau pengurangan dari pengeluaran yang digandakan untuk mengetahui penambahan dan pengurangan pendapatan lokal. Keynesian merupakan metode terbaik untuk merefleksikan keseluruhan dampak dari pengeluaran pemerintah diberbagai sektor . Rasio pendapatan multiplier yakni nilai yang diperoleh dari peningkatan dan penurunan pendapatan langsung dari ekonomi lokal yang digandakan untuk memperoleh hasil peningkatan dan penurunan total pendapatan lokal.

C. Pengeluaran Pemerintah

Dalam pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini maka ada beberapa teori yang menerangkan tentang pengeluaran pemerintah diantaranya:

1. Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang akan dianggarkan semakin tahun akan semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan pemerintah serta kondisi ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi

pembangunan. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

2. Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dihubungkan dengan pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi berbagai tahap antara lain tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase pengeluaran pemerintah terhadap jumlah pengeluaran pemerintah harus besar karena pemerintah seharusnya menyediakan seperti fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan transportasi. Pada tahap menengah pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dan pada tahap lanjutan Rostow berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan social seperti program pada usia tua serta program Kesehatan masyarakat.

Di Indonesia sendiri pengeluaran pemerintah dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk pengeluaran pembiayaan, diantaranya ada pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan. Berikut ini akan diterangkan pengertian dari dua pengeluaran pemerintah.

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi Daerah dan subsidi harga barang), (Prakasa, 2014) Angsuran dan bunga utang pemerintah serta jumlah pengeluaran yang lainnya. Anggaran belanja Rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain di upayakan melalui pinjaman alokasi

pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen /departemen dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan yang telah direncanakan. Ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran dimana pertama pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, kedua pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai serta pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan transfer. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan, dan pendapat disposable (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung) yang didapat oleh sektor swasta. Pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya. Pengeluaran pemerintah berupa pembiayaan subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Perubahan dari pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal; dapat keadaan resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk menaikkan output, jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika melihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke

tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi. Semakin meningkatnya peranan pemerintah dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dan proporsinya terhadap penghasilan nasional. W.W Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap total investasi, atau dengan perkataan lain rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional adalah relatif besar. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap dapat lepas landas. Bersama dengan itu porsi pihak swasta juga menjadi meningkat. Peranan pemerintah masih tetap besar disebabkan oleh pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi harus juga memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau yang terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus juga diperhitungkan siapa yang akan terperkerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta. Menurut (Ardiyanto, 2012) menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya, Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat.

Pengeluaran pemerintah menurut (Sitaniapessy, 2011) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu alat pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk investasi secara langsung maupun tidak langsung.

D. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Menurut (Tjodi et al., 2018) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam menyelenggarakan aktifitas pendidikan di suatu daerah. Dalam pengertian ini pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan aktifitas pendidikan baik dalam bentuk uang seperti bantuan pendidikan terhadap masyarakat yang kurang mampu, barang seperti pembangunan infrastruktur pendidikan serta tenaga seperti pemberian upah terhadap guru. Jadi Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan jenis pengeluaran daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan.

Sehingga dapat dikatakan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang sangat penting dalam pembangunan manusia. Karena pendidikan merupakan bagian penting dalam

pencapaian pembangunan manusia, yang juga bersifat esensial bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan memegang peranan penting yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam suatu negara untuk menyerap adanya sebuah teknologi modern, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Pendidikan juga memegang peranan penting untuk meningkatkan kapasitas yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable growth*).

Dilihat dari sektornya, Pendidikan merupakan salah satu program yang saat ini sedang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya. Oleh karena itu, adanya pengelurana pemerintah sektor pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan baik dari segi jumlah maupun kualitas pendidikannya serta dengan adanya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan masyarakat diharapkan mampu mendapatkan pelayan pendidikan secara optimal. Menurut (Rosen, 2008) dalam (Palayukan, 2019), melalui pendidikan pemerintah dapat menciptakan kestabilan negara dan sekolah akan memberikan suatu kekuatan dalam proses sosialisasi kehidupan, pendidikan akan memberikan perluasan kesempatan dari suatu doktrin politik negara yang menciptakan kestabilan suatu negara, sehingga dengan adanya kestabilan ini pembangunan manusia dapat berjalan dengan baik.

(Ranis & Stewart, 2005) berpendapat bahwa pendidikan yang merata dapat meningkatkan distribusi pendapatan dari waktu ke waktu terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mencari peluang ekonomi. Belanja dalam sektor pendidikan sangat penting dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan prasarana serta sistem pendidikan yang baik. Adanya alokasi dan realisasi anggaran belanja pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan salah satu wujud nyata dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan manusia. Anggaran pada sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat secara merata.

Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan telah tertulis dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, masyarakat diharapkan mendapatkan hak masyarakat untuk memperoleh Pendidikan yang layak dari pemerintah yang dapat diperoleh melalui fasilitas pendidikan yang berkualitas, dapat dijangkau oleh masyarakat.

E. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan salah satu jenis dari pengeluaran daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan juga digunakan untuk mendanai provinsi atau kabupaten/kota untuk memperbaiki di sektor kesehatan yang meliputi pemerataan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi setiap negara.

Menurut (Sanny Mongan, 2021) Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan alokasi anggaran untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik dan nonfisik di sektor kesehatan. Pemerintah membangun sarana dan prasarana publik sehingga masyarakat dapat memperoleh akses yang mudah terhadap pelayanan di sektor kesehatan. Dengan adanya kemudahan pelayanan tersebut, masyarakat akan memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, maka kebutuhan dasar masyarakat terhadap kesehatan akan terpenuhi sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan adanya pengoptimalan pengeluaran pemerintah, dalam hal tersebut khususnya pengeluaran untuk kepentingan kesehatan, maka kualitas kesehatan yang lebih baik dapat dihasilkan sehingga produktivitas yang tinggi akan lebih mudah dicapai.

Menurut (Ratulangi, 2019) persyaratan bagi suatu negara dalam meningkatkan produktifitas masyarakat serta meningkatkan pembangunan manusia yaitu dengan cara memenuhi salah satu hak dasar mereka, salah satu hak dasar bagi masyarakat yaitu memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik. Adanya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan adalah salah satu cara dalam memenuhi salah satu hak dasar tersebut. Dengan adanya masyarakat mendapatkan salah satu hak dasar tersebut maka secara tidak langsung dapat meningkatkan pembangunan manusia serta meningkatkan produktifitas masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Anggaran belanja pemerintah sektor Kesehatan diharapkan mampu tersebar di berbagai kabupaten/kota agar wilayah tersebut tidak terjadi kesenjangan. Selain itu, masyarakat diharapkan mendapatkan hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dari pemerintah yang dapat diperoleh melalui pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dapat dijangkau oleh masyarakat, tersebar secara merata.

F. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur

Sesuai dengan pasal 1 angka 65 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimaksud Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Belanja Infrastruktur yang dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, Jenis Infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup :

- Infrastruktur transportasi;

- Infrastruktur jalan;
- Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- Infrastruktur air minum;
- Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat;
- Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- Infrastruktur ketenagalistrikan;
- Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- Infrastruktur konservasi energi;
- Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- Infrastruktur fasilitas- fasilitas lainnya

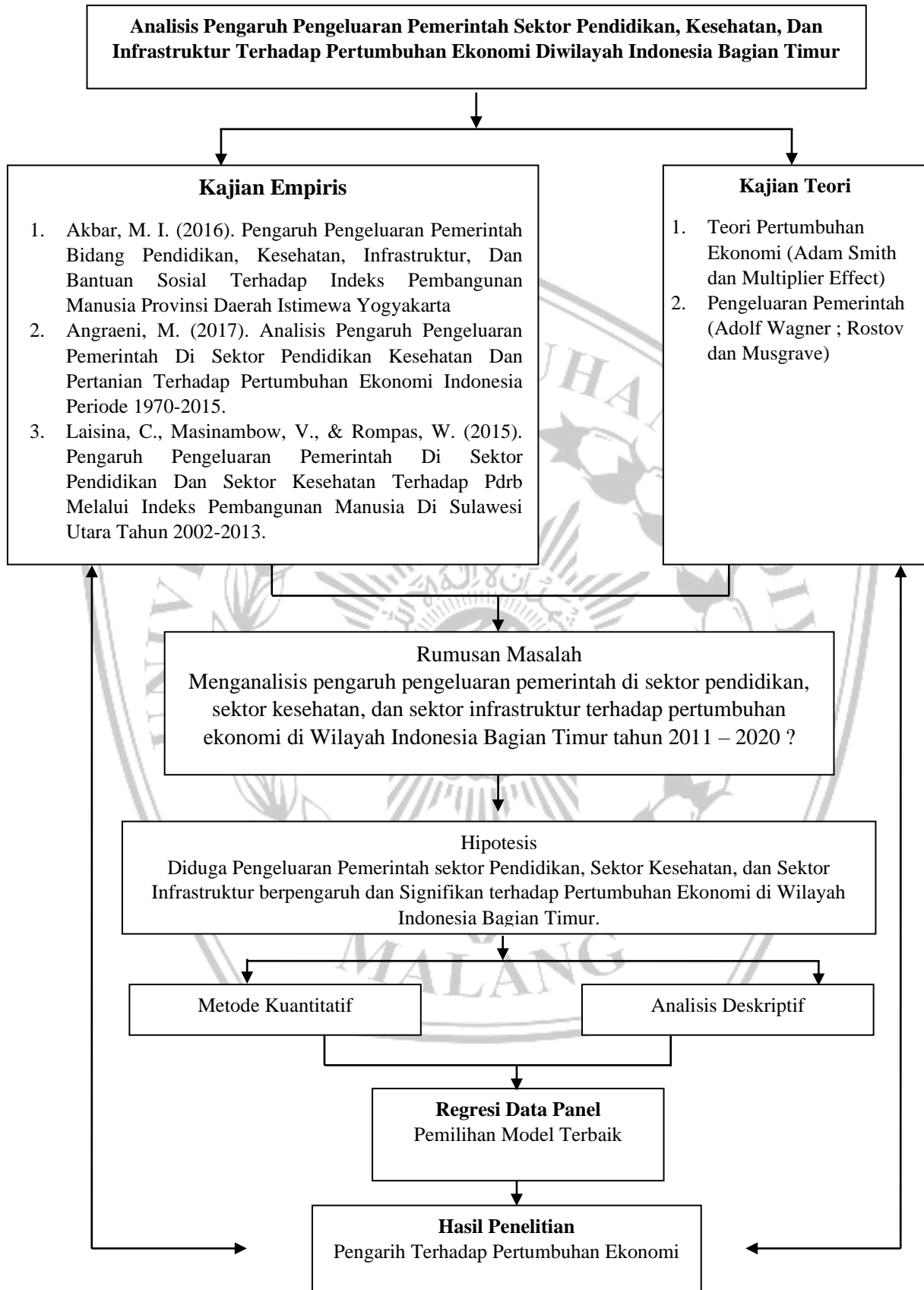
Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa di antaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur ke seluruh bagian wilayahnya.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia. Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sektor-sektor

terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat bersamaan, mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah di harapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur.



G. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Konsep Kerangka Pikir

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang di tentukan, oleh sebab itu hipotesis yang dirumuskan adalah :

H_0 : Diduga Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, dan Sektor Infrastruktur berpengaruh dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Timur.

